



**panrb**

KEMENTERIAN  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI

# JELANG PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE 2022

## IPPD HARUS APA?





01

**KEBIJAKAN UMUM  
SISTEM  
PEMERINTAHAN  
BERBASIS  
ELEKTRONIK**



# PERPRES 95 TAHUN 2018 TENTANG SPBE

## Definisi SPBE

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.

## Tujuan SPBE



Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel



Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya



Meningkatkan keterpaduan dan efisiensi penyelenggaraan SPBE

## Cakupan Layanan SPBE

Layanan:

- e-Office
- e-Planning
- e-Budgeting
- e-Monev
- e-JDIH

Layanan:

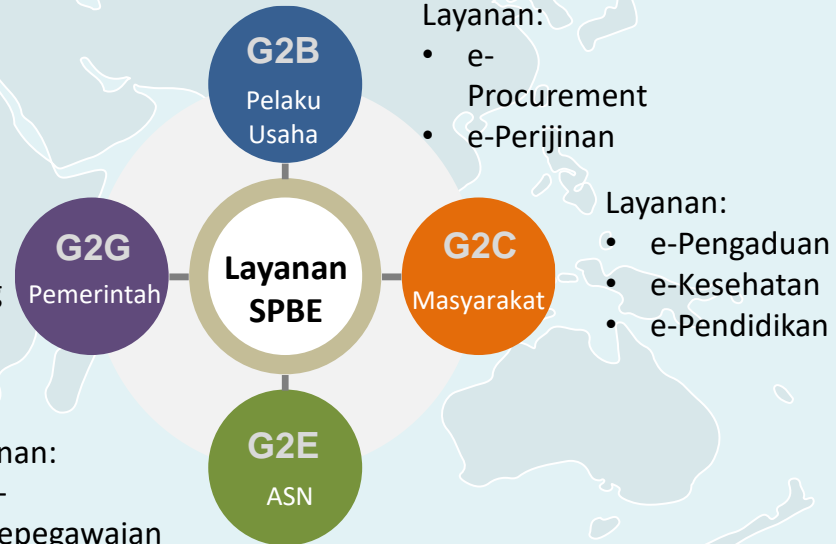
- e-Kepegawaian
- e-Pensiun

Layanan:

- e-Procurement
- e-Perijinan

Layanan:

- e-Pengaduan
- e-Kesehatan
- e-Pendidikan



# PROGRAM KERJA KEBIJAKAN SPBE

## FASE TRANSFORMASI

### Capaian

1. Peningkatan rata-rata indeks SPBE, tahun 2018: 1,98 (kurang) tahun 2019: 2,18 (cukup) tahun 2020: 2,26 (Cukup) tahun 2021: 2,24 (Cukup) dengan indikator penilaian baru, berprinsip keterpaduan nasional
2. Kenaikan 19 peringkat e-Government Development Index (UN), tahun 2018: 107, menjadi tahun 2020: 88
3. Penetapan berbagai kebijakan turunan Perpres SPBE

## FASE TRANSFORMASI

- Terwujudnya **proses bisnis terintegrasi** melalui penerapan Arsitektur SPBE
- Terwujudnya **tematik layanan**
- Pemanfaatan **infrastruktur TIK Nasional Berbagi Pakai**
- **Peningkatan literasi digital** (Manajemen ASN Digital)

## SMART Government

- Penerapan penuh **layanan digital publik dan administrasi pemerintahan** nasional
- Pemanfaatan Big Data dan Kecerdasan Artifisial (*Data-Driven Government*)
- Mewujudkan konsep **Smart City** dengan pola kerja digital (*New Way of Working*) pada operasional di Kota Nusantara tahun 2024



PENGUATAN  
LAYANAN SPBE

PENGUATAN  
INFRASTRUKTUR  
SPBE



PEMBANGUNAN  
TIK 4.0

PENGEMBANGAN  
TIK 4.0



SMART GOVERNMENT

PENGUATAN  
TATA KELOLA

2020

2021

2022

2023

2024

Kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi bisnis, data dan informasi, aplikasi, infrastruktur SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan pemerintah yang terintegrasi


- Kementerian PPN/Bappenas (domain data dan informasi),
- Kementerian Kominfo (domain aplikasi dan infrastruktur TIK),
- BSSN (domain keamanan informasi)
- Kementerian PANRB (domain proses bisnis dan layanan digital)

# PENTINGNYA ARSITEKTUR SPBE


*(Enterprise Government Architecture)*

Target penerapan Arsitektur SPBE, untuk Instansi Pusat hingga tahun 2023 dan untuk Pemerintah Daerah hingga tahun 2024


**NON-STANDARD**




**DUPLICATION**





**SILO**



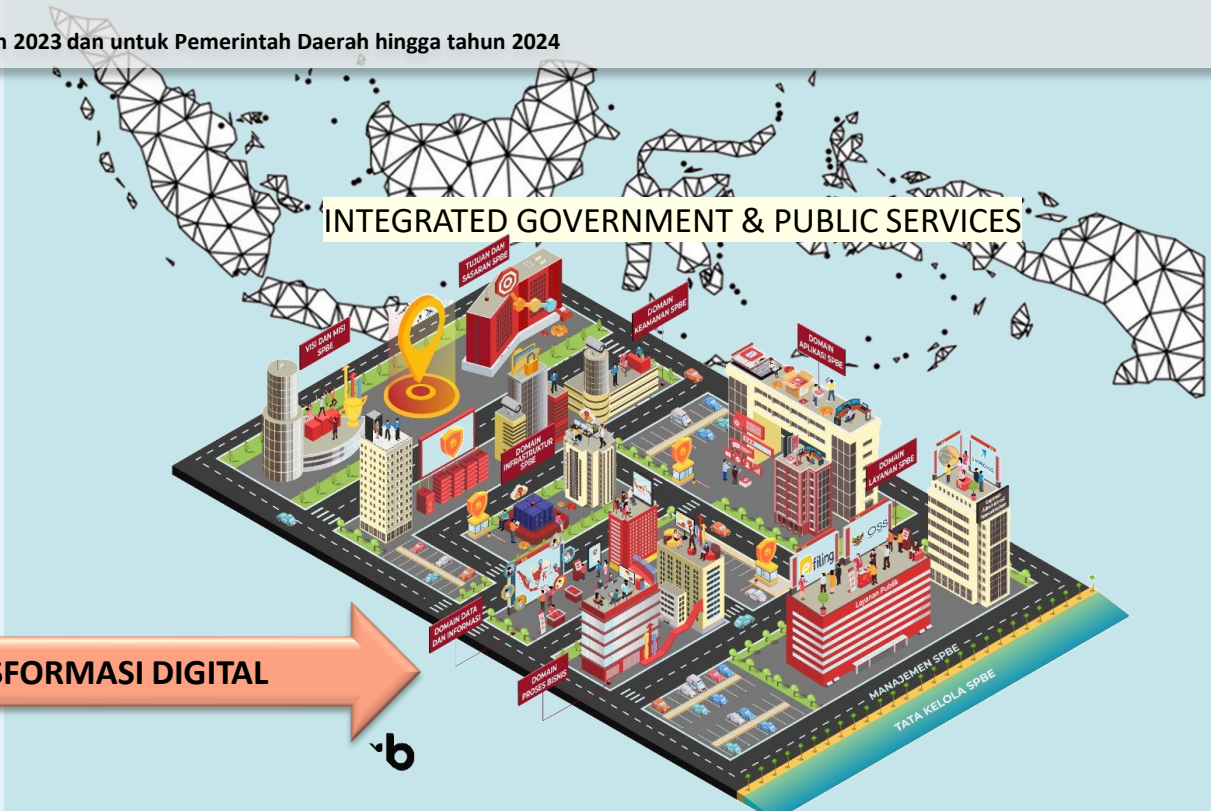
27.400 Aplikasi yang berpotensi duplikasi.\*  
 2700 pusat data/ruang server.\*  
 Terjadinya pemborosan anggaran akibat terbangunnya sistem yang silo dan tidak terintegrasi mengingat setiap instansi membangun aplikasi pemerintahan sendiri.  
 Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang transparan, cepat, dan efektif.



**TRANSFORMASI DIGITAL**

**INTEGRATED GOVERNMENT & PUBLIC SERVICES**



\* Data Kementerian KOMINFO



02

**METODOLOGI  
PEMANTAUAN DAN  
EVALUASI SPBE**



# STATUS LOKUS IPPD PADA PEMANTAUAN DAN EVALUASI TAHUN 2022

## Pemantauan Wajib

Untuk IPPD dengan Indeks SPBE Tahun 2021 **kurang dari 2.60**

## Evaluasi

Untuk IPPD yang **belum memiliki Indeks SPBE**

Unduh Daftar Lengkap:  
<https://bit.ly/LokusTAUVALSPBE2022>



## Kandidat Pemantauan Tambahan

Untuk IPPD dengan Indeks SPBE Tahun 2021 **lebih dari 2.60 dan mendaftarkan pengajuan (usulan)**

## Tidak Dilakukan Pemantauan dan Evaluasi

Untuk IPPD dengan Indeks SPBE Tahun 2021 lebih dari 2.60 dan **tidak mendaftarkan pengajuan**

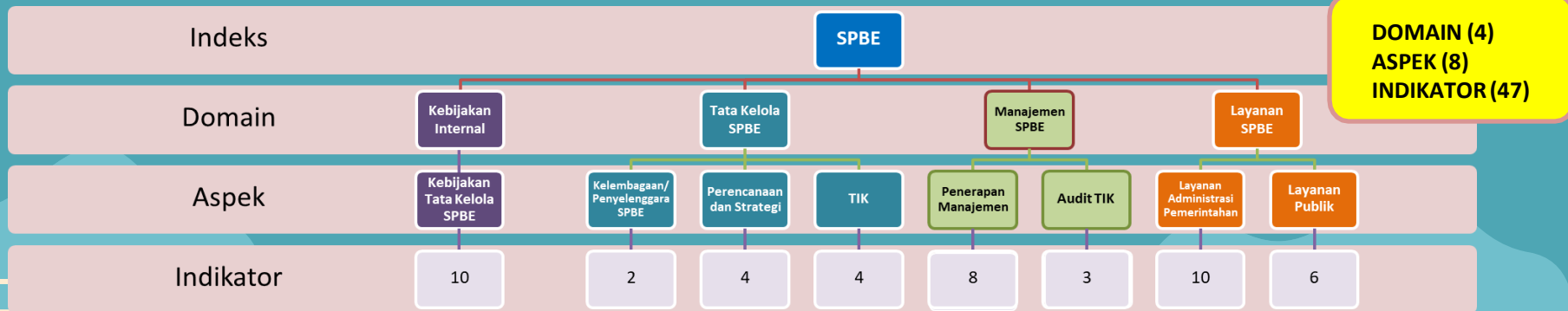


# KEBIJAKAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI (TAUVAL) SPBE

PERMENPANRB NO. 59 TAHUN 2020 TENTANG PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE



## STRUKTUR PENILAIAN





# PROSES TAUVAL

## METODE EVALUASI PERMENPANRB 59/2020

Mengukur tingkat kematangan (skala 1 - 5) pada 47 indikator penilaian di domain Kebijakan, Tata Kelola, Manajemen, dan Layanan SPBE

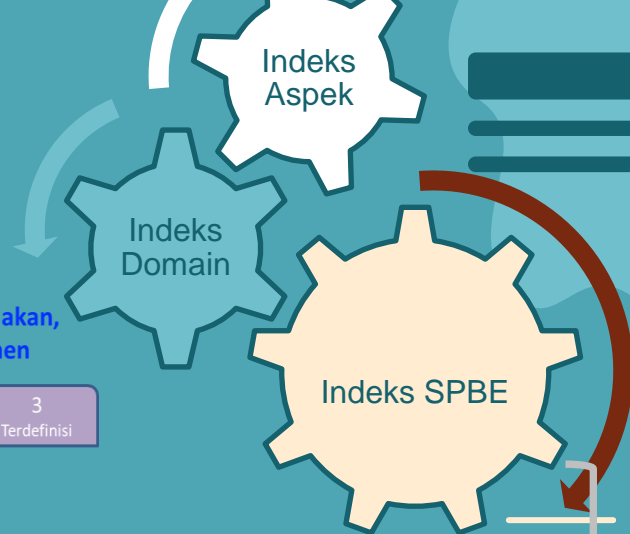
Kebijakan	Kebijakan Tata Kelola SPBE	•Indikator kebijakan internal yang mendukung penerapan tim koordinasi SPBE, perencanaan, strategi, manajemen, dan Audit TIK SPBE.
	Perencanaan Strategis SPBE	•Indikator terkait arsitektur, peta rencana, anggaran, dan proses bisnis SPBE.
Tata Kelola	Teknologi Informasi dan Komunikasi	•Indikator kematangan pembangunan jaringan intra pemerintah, pusat data, dan sistem penghubung layanan SPBE.
	Penyelenggara SPBE	•Indikator pelaksanaan tugas Tim Koordinasi SPBE dan kolaborasi penerapan SPBE.
Manajemen	Penerapan Manajemen SPBE	•Indikator manajemen risiko, keamanan informasi, data, aset,SDM, pengetahuan, perubahan, dan Layanan SPBE.
	Audit TIK	•Indikator audit infrastruktur, aplikasi, dan keamanan SPBE
Layanan	Layanan Administrasi Pemerintahan	•Indikator layanan perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan BMN,pengawasan, akuntabilitas, kinerja.
	Layanan Publik	•Indikator layanan pengaduan publik, data terbuka, JDIH, dan layanan publik unggulan lain.

### Tingkat Kematangan Kebijakan, Tata Kelola, dan Manajemen

1 Rintisan	2 Terkelola	3 Terdefinisi
4 Terpadu dan Terukur	5 Optimum	

### Tingkat Kematangan Layanan

1 Informasi	2 Interaksi	3 Transaksi
4 Kolaborasi	5 Optimum	



### Nilai Indeks SPBE:

- merupakan nilai kumulatif dari penghitungan perkalian antara nilai Indeks Domain dan bobot domain.
- nilai indeks yang merepresentasikan tingkat pelaksanaan SPBE secara keseluruhan.

NO	NAMA DOMAIN	JUMLAH INDIKATOR	BOBOT (100%)
1	KEBIJAKAN INTERNAL SPBE	10	13% (@1,3%)
2	TATA KELOLA SPBE	10	25% (@2,5%)
3	MANAJEMEN SPBE	11	16,5% (@1,5%)
4	LAYANAN SPBE	16	45,5% (@2,75%/@3%)

# METODE TAUVAL

## Pemantauan

### Persiapan

- Penyusunan Perencanaan;
- Pembentukan Tim Asesor;
- Sosialisasi pedoman pemantauan dan evaluasi SPBE.

### Pelaksanaan

- Penilaian mandiri;
- Penilaian dokumen;

### Pelaporan

- Indeks SPBE;
- Indeks Domain;
- Indeks Aspek; dan,
- Nilai Indikator.

## Evaluasi

### Persiapan

- Penyusunan Perencanaan;
- Pembentukan Tim Asesor;
- Sosialisasi pedoman pemantauan dan evaluasi SPBE.

### Pelaksanaan

- Penilaian mandiri;
- Penilaian dokumen;
- Penilaian interviu;
- Penilaian visitasi (jika diperlukan).

### Pelaporan

- Indeks SPBE;
- Indeks Domain;
- Indeks Aspek;
- Nilai Indikator; dan,
- Rekomendasi perbaikan.



# TAHAP PELAKSANAAN

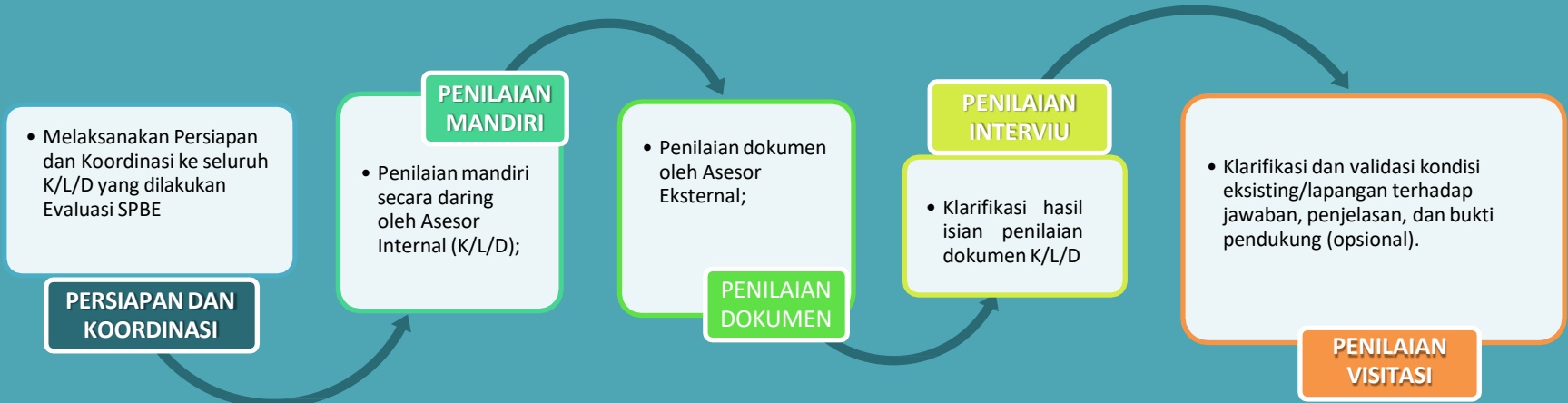
## 1. Pemantauan SPBE





# TAHAP PELAKSANAAN

## 2. Evaluasi SPBE





**03**

**PROGRES  
PEMANTAUAN DAN  
EVALUASI SPBE**





# PERINGKAT SPBE INDONESIA DI DUNIA

Hasil Pemantauan dan Evaluasi SPBE dimanfaatkan sebagai referensi dan data pendukung dalam UN e-Government Survey

**Indonesia** pada Indeks UN e-Government di tahun **2020** berada pada **peringkat 88 dengan skor 0.6612** meningkat **19** level dari tahun **2018** berada pada peringkat **107**. Skor masing-masing Komponen E-Government Development Index Indonesia:

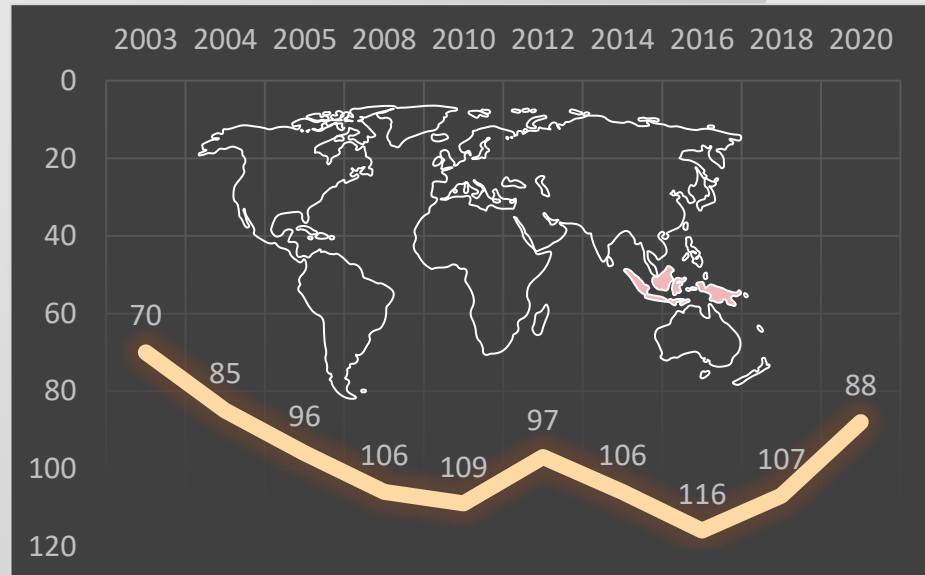
- Indeks Pelayanan Online (0.6824)
- Indeks Infrastruktur Telekomunikasi (0.5669)
- Indeks Sumber Daya Manusia (0.7342)

E-Participation Index Indonesia sudah mencapai 0.75 dengan predikat Very High Participation Index.

Open Government Data Index Indonesia sudah mencapai nilai maksimum 1.00 dengan predikat Predikat Very High OGDl.

Sumber : UN e-Government Survey

Peringkat SPBE Indonesia di Dunia



# PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE TAHUN 2021

## SASARAN DAN TUJUAN



Mengukur capaian penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemda, serta Indeks SPBE Nasional



Secara faktual mendorong Instansi Pusat dan Pemda menerapkan SPBE dan melakukan Transformasi Digital



Meningkatkan efektifitas dan efisiensi, serta kualitas dalam penerapan layanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik pada Instansi Pusat dan Pemda

## DASAR HUKUM

- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- Keputusan Menteri PANRB Nomor 962 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

## TARGET PELAKSANAAN

Partisipasi  
**517 IPPD**  
dari 637 IPPD



Pelaksana

**25 PT &  
7 K/L Tim**  
Koordinasi SPBE  
Nasional



Indeks SPBE  
Nasional  
**2,24**

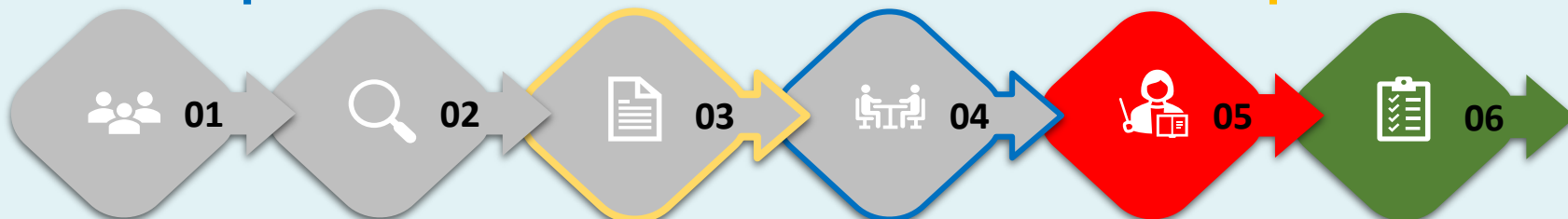


# LAPORAN PELAKSANAAN DAN TINGKAT PARTISIPASI EVALUASI SPBE TAHUN 2021

## Tahap Perencanaan

## Tahap Pelaksanaan

## Tahap Pelaporan



28 - 29 April 2021

### SOSIALISASI

Sosialisasi evaluasi SPBE kepada seluruh Asesor Internal IPPD.

28 April – 7 Juli 2021

### PENILAIAN MANDIRI

Penilaian Mandiri secara daring melalui Aplikasi oleh Asesor Internal (K/L/Pemda);

7 Juli – 17 Agustus 2021

### PENILAIAN DOKUMEN

Verifikasi dan validasi melalui Penilaian Dokumen oleh Asesor Eksternal dan Reviu

23 Agustus – 18 September 2021

### PENILAIAN INTERVIU

Klarifikasi dari Asesor Eksternal melalui Interviu kepada Asesor Internal K/L/D dan Reviu

Dihilangkan

### PENILAIAN VISITASI

Klarifikasi lebih lanjut dengan metode Visitasi dan Reviu

22 Sept – 21 Des 2021

### PELAPORAN

Konsolidasi dan penyusunan analisis dan rekomendasi, serta pengolahan data dan penyusunan LHE.

DAFTAR RESPONDEN PENILAIAN DOKUMEN	MENYAMPAIKAN	TIDAK MENYAMPAIKAN	JUMLAH POPULASI
KEMENTERIAN	34	0	34
LPNK	25	0	25
LEMBAGA LAINNYA	33	3	36
PEMERINTAH PROVINSI	33	1	34
PEMERINTAH KABUPATEN	300	115	415
PEMERINTAH KOTA	90	3	93
<b>TOTAL</b>	<b>515</b>	<b>122</b>	<b>637</b>

#### Catatan:

Target pemenuhan lokus tidak dapat dipenuhi mengingat kondisi dan keterbatasan pelaksanaan Evaluasi SPBE Tahun 2021

DAFTAR RESPONDEN	HADIR	TIDAK HADIR	JUMLAH
KEMENTERIAN	34	-	34
LPNK	25	-	25
LEMBAGA LAINNYA	33	-	33
PEMERINTAH PROVINSI	32	1	33
PEMERINTAH KABUPATEN	296	3	300
PEMERINTAH KOTA	87	3	90
<b>TOTAL</b>	<b>508</b>	<b>7</b>	<b>515</b>

#### Catatan:

Terdapat tambahan 9 Pemda yang terdiri dari 1 Pemprov Papua, 6 Pemkab di Papua Barat, 1 Pemkab di Papua, serta 1 Pemkab Maluku, sehingga total partisipasi sebanyak 517 IPPD

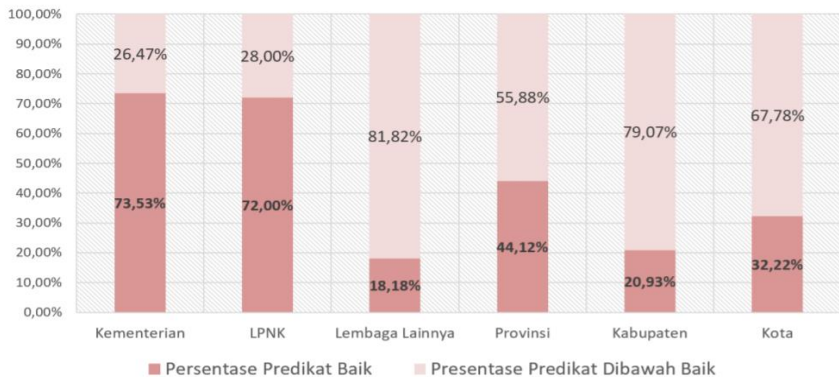




# TARGET EVALUASI SPBE TAHUN 2022

## Kondisi Saat ini

Distribusi Nilai Indeks SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Predikat



INTANSI PEMERINTAH	KURANG (< 1,8)	CUKUP (1,8 - < 2,6)	BAIK (2,6 - < 3,5)	SANGAT BAIK (3,5 - < 4,2)	MEMUASKAN (4,2 - < 5,0)	JUMLAH
KEMENTERIAN	2	7	22	3	0	34
LPNK	2	5	16	2	0	25
LEMBAGA LAINNYA	9	18	6	0	0	33
PEMERINTAH PROVINSI	4	13	16	1	0	34
PEMERINTAH KABUPATEN	94	144	60	3	0	301
PEMERINTAH KOTA	19	41	30	0	0	90
<b>TOTAL</b>	<b>130</b>	<b>228</b>	<b>150</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>517</b>

HASIL EVALUASI SPBE TAHUN 2021 (PermenPANRB 59/2020) yang menerapkan SPBE dengan Baik

- 53,26% K/L
- 50,00% Pemprov
- 23,79% Pemkab/Pemkot

TARGET EVALUASI SPBE TAHUN 2022 \*)  
Jumlah IPPD yang menerapkan SPBE dengan predikat Baik

- 80% Instansi Pusat
- 60% Pemerintah Provinsi
- 30% Pemerintah Kabupaten/Kota

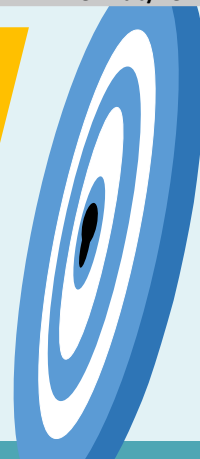
## TARGET RPJMN PADA 2024

Jumlah K/L/D yang menerapkan SPBE dengan predikat Baik

100%  
Instansi Pusat

80%  
Pemerintah  
Provinsi

50%  
Pemerintah  
Kab/Kota



\*) Dengan mekanisme Pemantauan SPBE



# ISU-ISU DAN LESSON LEARNED DALAM PELAKSANAAN EVALUASI SPBE



Komitmen

Komitmen Tim Asesor Internal dalam pelaksanaan evaluasi SPBE (*Continuous improvement*)



Diskrepansi

Diskrepansi pemahaman antar Tim Asesor Internal K/L/Pemda



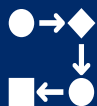
Akurasi

Akurasi dan validitas dari tanggapan/penjelasan atas data dukung yang disampaikan



Kualitas dan Waktu Penilaian Mandiri

Waktu pelaksanaan penilaian mandiri mempengaruhi kualitas hasil



Adaptasi Pola Kerja

Protokol kesehatan dan adaptasi pola kerja baru (Pelaksanaan kegiatan secara online)



Ketersediaan SDM

Keterbatasan jumlah SDM untuk Tim Asesor Internal dalam melakukan penilaian



Pembinaan Wilayah

Instansi yang wilayahnya memiliki Asesor Eksternal (Perguruan Tinggi) cenderung mendapatkan keuntungan pembinaan.



## RENCANA TINDAK LANJUT

### ASISTENSI & PILOTING SPBE



**Asistensi SPBE** – dilaksanakan oleh KemenPANRB melalui kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis

**Piloting SPBE** – dilaksanakan oleh KemenPANRB berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi (Percontohan), untuk melakukan pembinaan yang lebih intensif mengenai penerapan SPBE pada Kabupaten/Kota di wilayahnya.

### PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE



**Pemantauan SPBE** – dilaksanakan untuk melakukan penilaian atas IPPD yang Indeks SPBE –nya masih dibawah ‘Baik’ dan/atau IPPD yang melakukan permohonan untuk dilakukan pemantauan dengan ketentuan khusus.

**Evaluasi SPBE** – dilaksanakan untuk melakukan penilaian atas IPPD yang belum memiliki Indeks SPBE pada Tahun 2021 dengan mekanisme tertentu.



# REKOMENDASI HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE NASIONAL



## Komitmen

Meningkatkan kesadaran dan komitmen Pimpinan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk dapat memberikan arah kebijakan dan koordinasi penerapan SPBE di instansinya masing-masing;



## Tata Kelola

Mengupayakan penguatan kebijakan internal tata Kelola SPBE sebagai pedoman dalam penerapan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah



## Anggaran Belanja TIK

Mengoptimalkan strategi perencanaan penerapan SPBE dan anggaran belanja SPBE yang efektif dan efisien di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah



## Literasi

Meningkatkan kapasitas dan literasi SPBE bagi SDM di Instansi Pusat dan Pemda dalam mendukung peningkatan penerapan SPBE



## Kolaborasi Internal

Meningkatkan kerjasama, kolaborasi dan keterpaduan dalam penerapan SPBE antar perangkat/unit kerja dengan membentuk Tim Koordinasi SPBE



## Kolaborasi Eksternal

Membangun koordinasi dan kolaborasi melalui forum antar instansi, baik pusat maupun daerah dalam rangka mengoptimalkan penerapan SPBE yang terpadu dan terintegrasi



## Layanan SPBE

Mengoptimalkan penerapan layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik berbasis elektronik yang terintegrasi, serta berdaya guna mendukung akselerasi pemanfaatan aplikasi umum berbagi pakai



# RELASI PENILAIAN INDEKS SPBE UNTUK TUJUAN PROGRAM NASIONAL PEMERINTAH



## Program Nasional

SPBE merupakan bagian dari program nasional sebagai bagian penataan kelembagaan berbasis prioritas pembangunan nasional



## Digital Services

Pengukuran terhadap kepatuhan penerapan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik yang bertujuan mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya menuju layanan digital nasional



## Smart Government

Pengukuran tingkat kematangan 4 Domain (Kebijakan, Tata Kelola, Manajemen, Layanan), dimana salah satunya memastikan penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE di IPPD sehingga memastikan penerapan SPBE sudah bersifat *nation-wide*



## Transformasi Digital Nasional

Pengukuran memastikan penerapan SPBE bersifat komprehensif, dengan mengukur tingkat penerapan Arsitektur SPBE yang memiliki 6 domain (proses bisnis, data dan informasi, layanan SPBE, aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE dan keamanan SPBE)

### Catatan:

Target penyelesaian penetapan Arsitektur SPBE Instansi Pusat hingga akhir Tahun 2022 dan untuk Pemerintah Daerah hingga akhir Tahun 2023



**04**

**KOLABORASI  
DALAM  
PEMANTAUAN DAN  
EVALUASI SPBE**



# TIM KOORDINASI SPBE IPPD

## Ketua

- Menteri/Kepala Lembaga/ Kepala Daerah
- Mengarahkan dan menetapkan kebijakan SPBE

## Sekretaris

- Sebagai Koordinator SPBE
- Mengoordinasikan penerapan kebijakan SPBE di K/L/D
- Mengoordinasikan layanan pemerintahan
- Mengoordinasikan SPBE dengan instansi pusat dan pemda lain

## Organisasi dan Tata Laksana

- Mengoordinasikan integrasi proses bisnis di K/L/D
- Mengelola arsitektur bisnis
- Mengelola layanan

## Keuangan

- Mengoordinasikan penganggaran SPBE Pemda

## Dewan TIK Daerah/ Perguruan Tinggi

- Memberikan rekomendasi arah pembangunan TIK
- Opsional



## TIK / Kominfo

- Mengelola Arsitektur SPBE
- Mengoordinasikan pembangunan aplikasi dan infrastruktur TIK
- Penerapan keamanan SPBE
- Melaksanakan manajemen aset TIK dan Layanan
- Wali data

## Perencanaan

- Mengoordinasikan perencanaan SPBE di K/L/D
- Mengoordinasikan tata kelola data dan manajemen data

## Unit Sektor

- Menyampaikan kebutuhan layanan SPBE di K/L/D
- Mengelola kebutuhan layanan SPBE



# PERAN DALAM PELAKSANAAN EVALUASI SPBE

Tim Asesor Internal (K/L/D)

- Koordinator SPBE
- Penanggung jawab (Supervisor)
- Pelaksana Entri Data (Operator)
- Anggota Tim

Tim Asesor Eksternal  
(Tim Koordinasi SPBE Nasional  
dan Perguruan Tinggi)

- Tim Penilai

Kementerian PANRB

- Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana selaku koordinator dan penanggung jawab pelaksanaan evaluasi SPBE





# STRUKTUR TIM ASESOR INTERNAL

Tim Asesor Internal ditetapkan oleh pimpinan Instansi Pusat/Kepala Daerah dimana struktur Tim Asesor Internal terdiri atas:





# PENGUATAN TIM ASESOR INTERNAL IPPD

Koordinator SPBE K/L/Pemda membentuk Tim Asesor Internal.

## TIM ASESOR INTERNAL

Anggota Tim Asesor Internal terdiri dari Pejabat/pegawai yang berasal dari unit kerja/perangkat daerah yang menjalankan fungsi terkait dengan lain:

- Organisasi dan ketatalaksanaan;
- Pengelolaan data dan informasi;
- Teknologi informasi dan komunikasi;
- Keamanan Informasi;
- Hukum;
- Perencanaan;
- Penganggaran;
- Akuntabilitas kinerja;
- Keuangan;
- Pengadaan barang dan jasa pemerintah;
- Pengelolaan barang milik negara/daerah;
- Sumber daya manusia;
- Kearsipan;
- Pengawasan; dan,
- Pelayanan publik.



**05**

**STRATEGI  
PEMANTAUAN DAN  
EVALUASI SPBE  
TAHUN 2022**



# Kaidah Pengisian Penjelasan Penilaian Mandiri

Area **CATATAN INSTANSI** dan **DAFTAR DOKUMEN**

AREA ISIAN PENJELASAN TIM ASESOR INTERNAL K/L/D

UPLOAD DOKUMEN PENDUKUNG

KEMENTERIAN  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI

Indikator 10

Domain : Kebijakan SPBE

Aspek : Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE

Indikator : Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

Penjelasan Indikator

Tingkat	Kriteria	Capaian
1	Konsep kebijakan internal terkait Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah tersedia. catatan	<input type="radio"/>
2	Kebijakan internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditetapkan. Kondisi: Kebijakan internal terkait Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mencakup pengaturan tugas-tugas Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang mendukung penerapan SPBE pada sebagian unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. catatan	<input type="radio"/>
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kebijakan internal terkait Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mencakup pengaturan tugas-tugas Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang mendukung penerapan SPBE pada seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. catatan	<input type="radio"/>
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, kebijakan internal terkait Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang mendukung penerapan SPBE antar Instansi Pusat, antar Pemerintah Daerah, dan/atau antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan kebijakan internal terkait Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah direviu dan dievaluasi secara periodik. catatan	<input checked="" type="radio"/>
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal terkait Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru. catatan	<input type="radio"/>

Showing 1 to 5 of 5 entries

Upload Dokumen Pendukung

File Unggah satu [pdf] atau banyak file [zip/tar] \*max 100MB

\*panjang nama file maksimum 60 karakter. Jika melebihi 60 karakter, sistem akan otomatis memotong nama file menjadi 60 karakter  
\*pabila ukuran file unggah melebihi ketentuan batas maksimum, agar dapat memferensikan utilitik data dukungan dalam penjelasaan

Tutup Upload dan Simpan

1 Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Indikator 1



# PERMASALAHAN PENGISIAN PENJELASAN PENILAIAN MANDIRI



**KAIDAH: LAKUKAN PENGISIAN PENJELASAN DAN DATA DUKUNG DENGAN BAIK & TERSTRUKTUR**



# PERMASALAHAN PENGISIAN PENJELASAN PENILAIAN MANDIRI

Kalimat isian  
**PENJELASAN**  
menyampaikan  
**FAKTA, HASIL  
ANALISIS dan  
JUSTIFIKASI  
LEVEL**  
Kematangan

Contoh kalimat **PENJELASAN**:

Kebijakan internal terkait Tim Koordinasi SPBE Internal tercantum dalam << ***Nama Dokumen Kebijakan*** >> << ***Nomor ... Tahun 20..*** >> tentang << ***Uraian Nama Kebijakan*** >>, yaitu pada pasal << ***Nomor Pasal*** >> halaman << ***Nomor Halaman*** >> tentang << ***Uraian Nama Pasal*** >> yang disampaikan pada file << ***Nama File Lampiran Data Dukung*** >>-- **FAKTA**

Berdasarkan pasal tersebut pengaturan telah << ***mencakup pengaturan tugas-tugas Tim Pengarah SPBE yang dapat diterapkan di semua unit kerja atau semua perangkat daerah.*** >> -- **ANALISIS** sesuai kriteria level

Sehingga dari penjelasan dan data dukung yang disampaikan tersebut di nilai telah menggambarkan **Tingkat Kematangan Level 3 – JUSTIFIKASI LEVEL**

## KAJIDAH PENULISAN PENJELASAN (2)

Contoh kalimat **PENJELASAN**:

Kebijakan internal terkait Tim Pengarah SPBE tercantum dalam << **Nama Dokumen Kebijakan** >> << **Nomor ... Tahun 20..** >> tentang << **Uraian Nama Kebijakan** >>, yaitu pada pasal << **Nomor Pasal** >> halaman << **Nomor Halaman** >> tentang << **Uraian Nama Pasal** >> yang disampaikan pada file << **Nama File Lampiran Data Dukung** >>-- **RUJUKAN** ke data dukung.

Sementara itu, penetapan personil dan tugas-tugas Tim Pengarah SPBE tercantum dalam << **Nama Dokumen Kebijakan** >> << **Nomor ... Tahun 20..** >> tentang << **Uraian Nama Kebijakan** >>, yaitu pada pasal << **Nomor Pasal** >> halaman << **Nomor Halaman** >> tentang << **Uraian Nama Pasal** >> yang disampaikan pada file << **Nama File Lampiran Data Dukung** >>-- **RUJUKAN** ke data dukung.

Contoh list 2 nama file lampiran sebagai **DATA DUKUNG PENJELASAN**:

Indikator1a-Permen-TataKelolaSPBE.pdf  
Indikator1b-SKMenteri-TimKoordinasiSPBE.pdf

Sampaikan **DATA DUKUNG** yang **RELEVAN** dan **DIRUJUK** pada kalimat **PENJELASAN**

Penamaan **FILE DATA DUKUNG** dibuat **IDENTIK** dengan **ISI** dan terurut sesuai penjelasan

# KAJIDAH PENYAMPAIAN DOKUMEN DATA DUKUNG

SCAN file  
DATA  
DUKUNG  
memiliki  
kemampuan  
SEARCH-able

Perpres Nomor 95 Tahun 2018.pdf  
Page 6 of 110

View  
Zoom Share Highlight Rotate Markup

Search: Manajemen  
Found on 35 pages

Sort By: Search Rank Page Order

Perpres Nomor 95 Tahun...

- Page 1 1 match  
b bahwa untuk meningkatkan ... diperlukan tata kelol...
- Page 2 1 match  
Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk menca...
- Page 6 1 match  
Manajemen SPBE;
- Page 14 1 match  
Manajemen SPBE;
- Page 24 1 match  
a. memenuhi Standar Nasional ... terkait d...
- Page 25 1 match  
(6) Dalam hal Standar Nasional ... terkait d...

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Presiden ini meliputi:

- Tata Kelola SPBE;
- Manajemen SPBE;
- Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- penyelenggara SPBE;
- percepatan SPBE; dan
- pemantauan dan evaluasi SPBE.

BAB II  
TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
Bagian Kesatu  
Umum

Contoh proses **SEARCH** terhadap file dokumen **DATA DUKUNG** dengan kata kunci pencarian **MANAJEMEN**



# TIPS DALAM TAHAPAN PENILAIAN INTERVIU

**PIC**  
Anggota  
Tim Asesor

Siapkan **DATA DUKUNG** dengan catatan yang lengkap untuk setiap indikator pertanyaan beserta daftar **PIC**-nya

**OPERATOR**  
Layanan/Aplikasi

Siapkan **OPERATOR** layanan **APLIKASI** untuk mendemokan **FITUR FUNGSI TEKNIS** Layanan (*username* dan *password*)

**VIDEO**

Siapkan **VIDEO** penggunaan **APLIKASI** untuk setiap Layanan yang tersimpan pada repositori yang dikelola mandiri

**RESPON**  
DATA DUKUNG  
TAMBAHAN

Lakukan **FAST RESPONSE** unggah tambahan Data Dukung yang diminta saat proses Interview oleh Asesor eksternal

**TIPS: PERKUAT KOLABORASI STAKEHOLDER**

# TIPS DALAM TAHAPAN PENILAIAN INTERVIU (2)

## Layanan A

No	Nama Pemohon	Nama Lembaga	Jenis Bantuan	Berapa	Dana (Dibawah)	Barang (Dibawah)	Rekomendasi GPO	Anggaran (Dibawah)	Jenis Anggaran	Tahun Anggaran
1	Drs. PRIVO ISTANTO	Dinas Sosial								
2	Drs. PRIVO ISTANTO	Dinas Sosial								
3	Drs. PRIVO ISTANTO	Dinas Sosial								
4	Drs. PRIVO ISTANTO	Dinas Sosial								
5	Drs. PRIVO ISTANTO									
6	Drs. PRIVO ISTANTO									
7	SRI ARJUNINGSYAS	Pikom Ilmu Berbahasa								
8	USA FARIDA	SDIR BAGLE NATIONAL ACADEMY								
9	RINA ARIYANI	SPS/TP MELATI								
10	NIK WJAWANTI	M Pesantren								

### Form Pengajuan Permohonan

No KTP / NIK: 3572031602720004

Nama: WAHYUDI EKO SURONO

Tempat Lahir: BLITAR

Tgl Lahir: 1972-02-16

Alamat Lengkap: JLIMAM BONJOL GG. I NO.1

Pekerjaan/Aktivitas: PEGAWAI NEGERI SIPIL

Status Perkawinan: KAWIN

Jenis Kelamin: LAKI - LAKI

No Telp/HP: 1.000.000

Jenis Bantuan: Bantuan Sosial

Berupa: Uang

Kelompok Pemohon: Badan atau Lembaga

Bidang Penggunaan: Pemberdayaan Sosial

Tujuan Penggunaan: Testing

Nama Lembaga: Testing

Nama Bank: Testing

No. Rek Bank (Lembaga): Testing

No. NPWP (Lembaga): Testing

## Layanan B

```
function blitar() {
    $data = array();
    if (empty($this->input->post('nik')));
    $url = 'http://api.blitarkota.go.id/';
    $method = 'GET';
    $data['data'] = [
        $data['view'] = 'blitar';
        $data['user'] = 'blitar';
        $data['citizen_code'] = $this->input->post('nik');
        $dataWarga = json_decode($this->CustomcallAPI($method, $url, $data, TRUE);
        $citizen = $dataWarga[0];
        $cek_data = $this->db->where('no_ktp', $citizen['citizen_code'])->get('data_pemohon');
    //login kota menggunakan tabel data pemohon
    if ($cek_data->num_rows()) {
        $r = $cek_data->row_array();
        if ($r['password'] == md5(sha1($this->input->post('nama')))) {
            $this->session->set_userdata('s_id', $r['id']);
            $this->session->set_userdata('s_nik', $r['no_ktp']);
            $this->session->set_userdata('s_nama', $r['nama_lengkap']);
            $this->session->set_userdata('citizen_marriage', $r['status_perkawinan']);
            $this->session->set_userdata('citizen_occupation', $r['pekerjaan']);
            $this->session->set_userdata('citizen_address', $r['alamat']);
            $this->session->set_userdata('citizen_birthdate', $r['tanggal_lahir']);
            $this->session->set_userdata('citizen_birthplace', $r['tempat_lahir']);
            $this->session->set_userdata('citizen_phone', $r['no_telp']);
            $jenis_kelamin = $r['LAKI - LAKI'];
            $this->session->set_userdata('citizen_gender', $jenis_kelamin);
            redirect(site_url("proposal/proposal_saya"));
        } else {
            $data['pesan'] = 'Nama / Password yang anda masukkan salah !';
            $data['data'] = $data;
        }
    }
}
//end
if ($dataWarga) {
    // Menambah data pada tabel data pemohon
    if ($citizen['nama'] == strtoupper($this->input->post('nama'))) {
```

Evidence (exp:API)

Penjelasan **LAYANAN APLIKASI YANG TER-INTEGRASI** diisi dengan uraian aplikasi mana yang saling terintegrasi (**A KE B**) (**B KE A**) atau (**DUA ARAH A-B**) dengan menggunakan mekanisme pertukaran data seperti apa (**API**)

Tampilkan dan Buktikan Layanan SPBE sesuai data dukung yang konkrit

# REKOMENDASI PENYIAPAN PELAKSANAAN EVALUASI SPBE TAHUN 2022



## Kebijakan SPBE

Penyusunan kebijakan SPBE untuk mendukung pelaksanaan tata kelola dan manajemen SPBE di lingkungan internal/



## Tata Kelola SPBE

Dokumentasikan dengan baik setiap inisiatif program kerja dan proses pelaksanaan kegiatan di semua unit kerja terkait penerapan SPBE



## Manajemen SPBE

Siapkan kebijakan internal dan jalankan semua aspek penerapan manajemen SPBE, serta proses Audit TIK sebagai indikator baru 2022.



## Layanan SPBE

Terapkan aplikasi umum berbagi pakai dan layanan-layanan SPBE yang sudah berjalan di internal



## Data Dukung

Simpan setiap Data Dukung pada Repositori SPBE terpadu  
Exp: Dokumen Kebijakan, Rekaman Rapat, Materi Pelatihan, Dokumentasi Aplikasi, Tutorial Video, dsb





**06**

**TIMELINE  
KEGIATAN  
PEMANTAUAN DAN  
EVALUASI SPBE  
TAHUN 2022**





KEGIATAN	APRIL				MEI			
	WEEK 1	WEEK 2	WEEK 3	WEEK 4	WEEK 1	WEEK 2	WEEK 3	WEEK 4
<b>1. PELAKSANAAN ASISTENSI GENERALE 1</b>								
Asistensi Generale I								
<b>2. PELAKSANAAN ASISTENSI GENERALE 2</b>								
Asistensi Generale 2								

APRIL, MINGGU KE 2					
ASISTENSI GENERALE 1	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT
<b>SESI PAGI (08.00 – 12.00 WIB)</b>	Koordinasi Kegiatan	Domain Kebijakan, Tata Kelola SPBE	Domain Layanan SPBE + Arsitektur SPBE	Arsitektur SPBE IPPD	Evaluasi Kegiatan
ISTIRAHAT					
<b>SESI SIANG (13.00 – 16.00 WIB)</b>	Koordinasi Kegiatan	Domain Tata Kelola, Manajemen	Arsitektur SPBE Instansi Pusat / Pemerintah Daerah	Peta Rencana SPBE IPPD	Evaluasi Kegiatan

MEI, MINGGU KE 2					
ASISTENSI GENERALE 2	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT
<b>SESI PAGI (09.00 – 12.00 WIB)</b>	Koordinasi Kegiatan	Persiapan Kegiatan	Reviu Arsitektur SPBE	Reviu Peta Rencana SPBE	Audit TIK SPBE
ISTIRAHAT					
<b>SESI SIANG (13.00 – 16.00 WIB)</b>	Koordinasi Kegiatan	Persiapan Kegiatan	Revisi Arsitektur SPBE	Manajemen SPBE	Audit TIK SPBE



**TERIMA KASIH**

